

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP BELANJA MODAL
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019-2023**

Syahda Aprilia Faustina Naurah¹, Edi Jaenudin², Annisa Nabila Hasan³
Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran
syahdaapriliah2104@gmail.com

Abstract

The low proportion of capital expenditure within regional spending structures remains a critical concern in West Java Province, particularly due to the unresolved development and basic service infrastructure gap between the northern and southern regions. This study aims to analyze the influence of the regional own-source revenue (PAD) effectiveness ratio, PAD growth ratio, regional financial dependency ratio, and population size on capital expenditure. The research covers all regencies and cities in West Java Province, utilizing data from APBD reports, APBD realization reports, and BPS publications for the 2019-2023 period. A quantitative method with a panel data regression approach was employed, processed using EViews 12 Student Version. The findings indicate that the PAD effectiveness ratio and regional financial dependency ratio have a positive partial effect on capital expenditure, while the PAD growth ratio and population size have no partial effect. However, all independent variables simultaneously influence capital expenditure. These results emphasize the need to strengthen fiscal capacity through optimizing PAD and improving the management of intergovernmental transfers to support infrastructure development and public service improvement. Policy implications suggest enhancing PAD revenue bases, improving budget planning quality, and maximizing the productivity and sustainability of transfer utilization.

Keywords: *Capital Expenditure, PAD Effectiveness, PAD Growth, Regional Financial Dependency, Population Size, Regional Financial Performance*

Abstrak

Rendahnya proporsi belanja modal dalam struktur belanja daerah masih menjadi perhatian penting di Provinsi Jawa Barat, terutama karena belum terselesaikannya kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar antara wilayah utara dan selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk terhadap belanja modal. Subjek penelitian mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat dengan data APBD, realisasi APBD, dan publikasi BPS periode 2019-2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel menggunakan EViews 12 Student Version. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD dan rasio ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif secara parsial terhadap belanja modal, sedangkan rasio pertumbuhan PAD dan jumlah penduduk tidak berpengaruh. Secara simultan, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh terhadap belanja modal. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas fiskal melalui optimalisasi PAD dan pengelolaan dana transfer untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[attribution-noncommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan basis PAD, perencanaan anggaran yang lebih berkualitas, dan pemanfaatan transfer yang lebih produktif.

Kata Kunci: Belanja Modal, Efektivitas PAD, Pertumbuhan PAD, Ketergantungan Keuangan Daerah, Jumlah Penduduk, Kinerja Keuangan Daerah

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak era reformasi. Pemberlakuan desentralisasi memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan secara mandiri melalui penerapan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menciptakan kemandirian daerah sesuai dengan kapasitas dan karakteristiknya. Salah satu bentuk pelaksanaan otonomi tersebut tercermin melalui otonomi fiskal, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara efektif berdasarkan kebutuhan pembangunan wilayah.

Kebijakan belanja daerah, khususnya belanja modal, menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan otonomi fiskal. Belanja modal merupakan pengeluaran daerah yang diarahkan untuk memperoleh aset tetap dengan manfaat jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur, gedung pelayanan publik, serta fasilitas umum lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahkan menetapkan ketentuan bahwa alokasi belanja modal minimal 40% dari total belanja daerah. Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa komposisi belanja modal di sebagian besar pemerintah daerah masih jauh dari ketentuan tersebut dan cenderung lebih rendah dibandingkan belanja operasional dan belanja pegawai yang memakan porsi anggaran terbesar.

Tabel 1. Realisasi Belanja Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2019-2023

Realisasi Belanja Daerah Kabuptaen dan Kota di Jawa Barat pada Tahun 2019-2023					
Rincian Belanja Daerah	Proporsi Terhadap Belanja Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Daerah					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	39.09	38.85	37.60	36.45	34.88
Belanja Barang Jasa	28.87	28.73	30.73	33.00	34.36
Belanja Bunga	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05
Belanja Subsidi	0.12	0.16	0.09	0.02	0.02
Belanja Hibah	2.28	3.23	3.32	4.11	4.50
Belanja Bantuan Sosial	0.44	0.71	0.73	0.85	0.72
Belanja Modal					
Belanja Modal	18.22	13.79	14.47	13.71	13.85
Belanja Tidak Terduga					

Realisasi Belanja Daerah Kabuptaen dan Kota di Jawa Barat pada Tahun 2019-2023					
Rincian Belanja Daerah	Proporsi Terhadap Belanja Daerah				
	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Tidak Terduga	0.04	3.24	1.18	0.34	0.32
Belanja Transfer					
Belanja Bagi Hasil	0.89	0.86	0.85	0.97	1.03
Belanja Bantuan	10.04	10.42	11.00	10.52	10.28

Fenomena serupa juga terjadi di Provinsi Jawa Barat. Meskipun beberapa kabupaten dan kota berhasil meraih prestasi pembangunan melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), seperti Kota Bandung (2021), Kabupaten Sumedang (2022), dan Kota Sukabumi (2023), secara keseluruhan proporsi realisasi belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat pada periode 2019-2023 tidak mencapai batas minimal yang ditetapkan. Berdasarkan data DJPK, proporsi belanja modal hanya berkisar antara 13%-18%, jauh di bawah standar 40%. Kondisi ini memperlihatkan ketidakseimbangan struktur anggaran, di mana sebagian besar alokasi belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan proporsi mencapai 60% dari total belanja daerah, sehingga ruang fiskal untuk mendukung pembangunan infrastruktur publik menjadi sangat terbatas.

Rendahnya proporsi belanja modal tersebut berpotensi menghambat upaya pemerataan pembangunan, terlebih mengingat masih berlangsungnya kesenjangan infrastruktur dan pelayanan dasar antara wilayah utara dan selatan di Jawa Barat, sebagaimana menjadi isu strategis dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2029. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan belanja modal belum sepenuhnya selaras dengan prioritas pembangunan daerah yang menekankan percepatan pemerataan infrastruktur.

Faktor yang mempengaruhi alokasi belanja modal dapat berasal dari faktor fiskal maupun non-fiskal. Dari sisi fiskal, kinerja keuangan daerah diduga memiliki keterkaitan dengan kapasitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan PAD, dan tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain, aspek non-fiskal seperti jumlah penduduk juga memiliki potensi pengaruh terhadap penentuan belanja modal karena meningkatnya kebutuhan infrastruktur seiring pertumbuhan populasi. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sehingga kebutuhan penyediaan fasilitas publik secara otomatis meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana kinerja keuangan daerah serta faktor demografis berupa jumlah penduduk mempengaruhi alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2019-2023. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai hubungan antara kualitas pengelolaan keuangan daerah dan karakteristik wilayah terhadap belanja modal, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan strategis dalam penyusunan kebijakan penganggaran berbasis kinerja dan mendukung percepatan pembangunan yang merata sehingga masalah pemabngunan daerah yang berkelanjutan seperti kesenjangan infrastruktur dan pelayanan dasar antara wilayah utara dan selatan di Jawa Barat bisa terselesaikan. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengayaan literatur terkait determinan belanja modal yang masih menunjukkan inkonsistensi hasil pada penelitian sebelumnya.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Agensi

Teori agensi atau *agency theory* yang diungkapkan oleh Jensen and Meckling (1976) merupakan

hubungan keagenan dapat dipahami sebagai suatu perjanjian kerja sama antara pihak *principal* (pemilik) dan *agent* (pengelola), di mana *principal* memberikan pelimpahan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen untuk bertindak atas nama *principal* dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pemerintahan daerah, *principal* dapat dipahami sebagai masyarakat atau publik yang memberikan mandat melalui proses demokratis kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola sumber daya publik.

Pemerintah daerah sebagai agen, bertanggung jawab untuk mengelola dana publik secara efisien, efektif, dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Sementara itu, masyarakat selaku *principal* mengharapkan agar pemerintah dapat menggunakan anggaran, khususnya belanja modal, untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pengeluaran pemerintah daerah yang diarahkan untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal didefinisikan sebagai pengalokasian anggaran untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa proporsi belanja modal idealnya dialokasikan paling sedikit sebesar 40% dari total belanja daerah sebagai upaya memperkuat pembangunan daerah.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa aset yang diperoleh melalui belanja modal harus memenuhi karakteristik tertentu, antara lain memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan, digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta memenuhi nilai kapitalisasi minimal agar dapat dicatatkan sebagai aset tetap. Selain itu, aset yang dimaksud harus memiliki bentuk fisik yang dapat diidentifikasi, nilai perolehan yang dapat diukur secara andal, tidak diperjualbelikan dalam kegiatan operasional rutin, dan diperoleh untuk menunjang pelayanan publik.

Permendagri tersebut juga membagi belanja modal ke dalam beberapa kelompok, yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya, belanja aset lainnya

Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kinerja dapat diartikan sebagai hasil atau output yang dihasilkan dari suatu program atau kegiatan, baik yang sedang dilaksanakan maupun yang telah diselesaikan, yang mencerminkan tingkat pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kinerja keuangan menurut Hutabarat (2021) adalah proses evaluasi yang dilakukan oleh manajemen untuk menilai sejauh mana suatu entitas telah mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan dan prinsip yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2013) pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat sumber informasi keuangan seperti laporan keuangan yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat

Rasio Fektivitas PAD

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu entitas dalam mencapai tujuan, dalam konteks Pendapatan Asli Daerah (PAD) efektivitas PAD yaitu dimana pemerintah daerah dapat memobilisasi penerimaan PAD sesuai yang sudah ditargetkan (Mardiasmo, 2018). Tingkat efektivitas PAD dapat diukur melalui rasio efektivitas PAD. Menurut (Mahmudi, 2016) rasio efektivitas PAD dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan membandingkan penerimaan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan anggaran PAD yang ditetapkan. Penerimaan PAD diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Skala interval dari rasio efektivitas PAD sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkatan Efektivitas PAD

Kategori	Rasio Efektivitas PAD
Tidak Efektif	< 75%
Kurang Efektif	75 - 89%
Cukup Efektif	90 - 99%
Efektif	100%
Sangat Efektif	>100%

Sumber: (UGM, 1991)

Ketika rasio efektivitas PAD semakin tinggi maka semakin efektif dan baik juga kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio Pertumbuhan PAD

Dalam mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengukur pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan rasio pertumbuhan PAD. Menurut Mahmudi (2010) rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai apakah kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami peningkatan atau penurunan dalam suatu periode tertentu. Dalam konteks pertumbuhan PAD melalui rasio ini, dapat diketahui apakah PAD menunjukkan perkembangan yang positif atau justru mengalami penurunan dari tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian, rasio pertumbuhan memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan aktivitas keuangan dan mendukung keberlanjutan pembangunan dari waktu ke waktu. Menurut Halim (2007) rasio pertumbuhan PAD dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t-1)}{\text{PAD tahun } (t-1)} \times 100\%$$

Penerimaan PAD yang dimaksud diantaranya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Halim (2012) analisis pertumbuhan pendapatan digunakan untuk melihat apakah pemerintah daerah pada suatu tahun anggaran atau dalam beberapa periode mengalami peningkatan atau penurunan pendapatan. Melalui analisis ini dapat diketahui kondisi kinerja pendapatan daerah, apakah menunjukkan perkembangan yang positif dan cenderung meningkat dari waktu ke

waktu, atau justru mengalami penurunan. Idealnya, pertumbuhan pendapatan daerah terus bergerak ke arah positif sebagai indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Namun, apabila terjadi penurunan atau pertumbuhan negatif, kondisi tersebut menandakan adanya penurunan kinerja pendapatan yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk mengetahui faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan yang tepat.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah daerah dapat diketahui melalui perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2019) rasio ketergantungan keuangan daerah dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah dihitung dengan membandingkan pendapatan transfer yang diterima terhadap total pendapatan daerah. Pada perhitungan pendapatan transfer sendiri yang termasuk di dalamnya yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Untuk total pendapatan daerah sendiri yang termasuk yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Skala interval dari rasio ketergantungan daerah sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkatan Ketergantungan Keuangan Daerah

Kategori	Rasio Efektivitas PAD
Sangat Rendah	0 - 25%
Rendah	25 - 50%
Sedang	50 - 75%
Tinggi	75 - 100%

Sumber: (UGM, 1991)

Rasio ketergantungan keuangan daerah akan semakin baik jika persentasinya semakin rendah, rasio yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahannya.

Jumlah Penduduk

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan kebutuhan penyediaan pelayanan publik di suatu wilayah. Tingginya jumlah penduduk mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan dasar, sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan kapasitas penyediaan fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Pertumbuhan populasi secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan pendanaan pembangunan daerah. Kondisi tersebut berpotensi mendorong peningkatan alokasi belanja modal guna menjamin tersedianya pelayanan publik yang layak, merata, dan berkelanjutan. Dengan demikian, jumlah penduduk menjadi faktor penting dalam perencanaan anggaran daerah, khususnya terkait proporsi belanja modal sebagai bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah.

Temuan empiris memperkuat hubungan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Susiani & Rusianti (2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya, semakin besar jumlah penduduk suatu daerah, semakin besar pula kecenderungan peningkatan belanja modal untuk memenuhi tuntutan penyediaan fasilitas publik.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk terhadap belanja modal pada 27 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019-2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui laporan realisasi APBD dokumentasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan publikasi resmi Badan Pusat Statistik serta. Penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh, di mana seluruh populasi dijadikan sampel karena data tersedia secara lengkap, menghasilkan total 135 unit observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan perangkat lunak EViews 12 Student Version Lite. Pemilihan model regresi terbaik dilakukan melalui Chow Test dan Hausman Test untuk menentukan pilihan antara *Common Effect*, *Fixed Effect*, atau *Random Effect Model*. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data, sementara uji asumsi klasik seperti uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan kelayakan model. Selanjutnya, uji hipotesis dilakukan melalui uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap belanja modal dan uji F untuk menguji pengaruh secara simultan. Koefisien determinasi (Adjusted R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil analisis regresi menjadi dasar penarikan kesimpulan mengenai pengaruh variabel keuangan daerah dan demografis terhadap belanja modal pemerintah daerah. Operasional variabel terdiri atas variabel independen dan variabel dependen pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. Operasional Variabel

No	Variabel	Pengukuran	Skala	Instrumen Penelitian
1.	Rasio Efektivitas PAD (X1)	$\frac{\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%}{}$	Rasio	Laporan Realisasi APBD
2.	Rasio Pertumbuhan PAD (X2)	$\frac{\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t-1)}{\text{PAD tahun } (t-1)} \times 100\%}{}$	Rasio	Laporan Realisasi APBD
3.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (X3)	$\frac{\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%}{}$	Rasio	Laporan Realisasi APBD
4.	Jumlah Penduduk (X4)	Jumlah Penduduk Daerah Kabupaten/Kota	Jiwa	Badan Pusat Statistik
5.	Alokasi Belanja Modal (X5)	$\frac{\text{Alokasi Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%}{}$	Rasio	Laporan Realisasi APBD

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Penentuan Model Regresi Data Panel

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.962210	(26.104)	0.0000
Cross-section Chi-square	108.907539	26	0.0000

Setelah dilakukan pengujian data menggunakan uji Chow maka didapatkan hasil nilai probabilitas cross-section F sebesar $0.000 < \alpha (0.05)$ maka, dapat disimpulkan bahwasanya model yang terpilih *fixed effect model* (FEM). FEM lebih baik daripada *common effect model* (CEM) artinya, ada perbedaan signifikan antar individu atau antar entitas dalam data panel. Sehingga tidak tepat mengasumsikan bahwa semua entitas memiliki intercept yang sama. Karena hasil uji Chow menunjukkan bahwa FEM lebih baik maka perlu dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. D.f	Prob.
Cross-section radnom	24.288042	4	0.0001

Dari hasil uji Hausman di atas dapat diketahui nilai probabilitas cross-section random sebesar $0.000 < \alpha (0.05)$ maka, dapat disimpulkan bahwasanya model yang terpilih *fixed effect model* (FEM). Karena hasil uji Chow dan uji Hausman menunjukkan hasil yang sama yaitu FEM menjadi model yang terbaik, maka tidak perlu melanjutkan untuk melakukan uji *lagrange multiplier* dan menetapkan *fixed effect model* sebagai model terbaik yang akan digunakan pada penelitian ini.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.316614	-0.197984	0.310908
X2	0.316614	1.000000	-0.109604	0.024192
X3	-0.197984	-0.109604	1.000000	-0.37399
X4	0.310908	0.024192	-0.373991	1.000000

Menurut Napitupulu *et al.* (2021) uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui variabel independen apa saja yang memiliki korelasi yang kuat. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan mengetahui apakah nilai korelasi masing-masing variabel independen < 0.90 , artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas. Pada uji multikolinearitas didapatkan nilai korelasi antar semua variabel independen < 0.90 , yang mana artinya pada data ini tidak mengalami gejala multikolinearitas.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.048910	Mean dependent var	0.146077
Adjusted R-squared	0.019645	S.D. dependent var	0.053962
S.E. of regression	0.053430	Akaike info criterion	-2.984562
Sum squared resid	0.371117	Schwarz criterion	-2.876960
Log likelihood	206.4580	Hannan-Quinn criter.	-2.940836

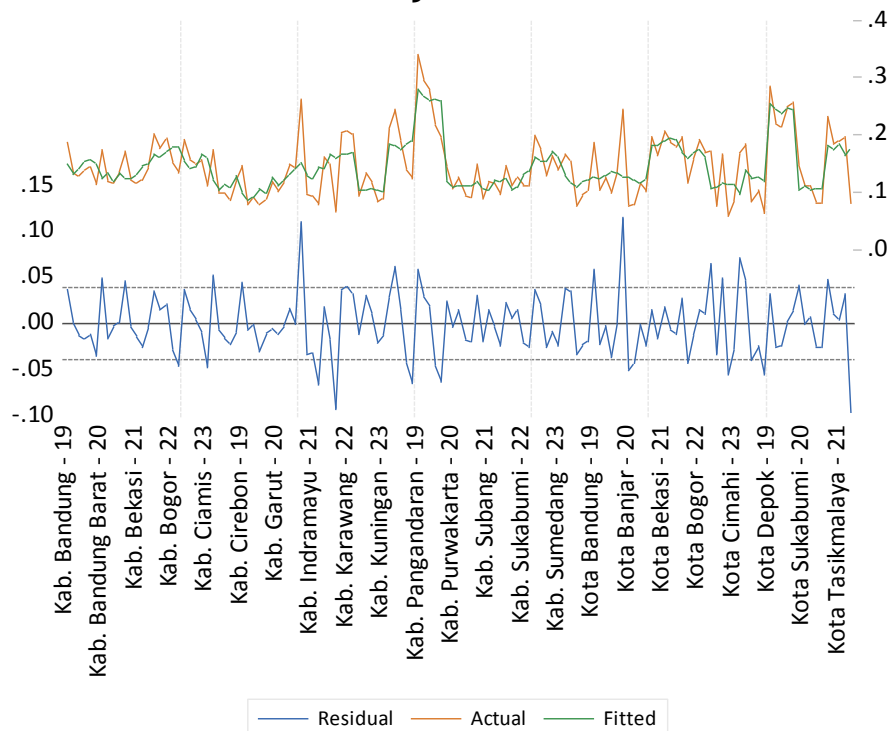
F-statistic	1.671306	Durbin-Watson stat	2.166947
Prob(F-statistic)	0.160510		

Menurut Napitupulu *et al.* (2021) uji autokorelasi *Durbin Watson* dapat dilakukan dengan nilai uji *Durbin-Watson* (dw) ini akan dibandingkan dengan nilai tabel *Durbin-Watson* (dw). Untuk mengetahui nilai tabel untuk $N = 27$ dan K (variabel independen) yaitu 4 variabel. Maka berdasarkan tabel acuan *Durbin Watson* dengan $\alpha = 0.05$ oleh Junaidi (2010) dapat diketahui sebagai berikut:

- Nilai DL = 1.0836
- Nilai 4 - DL = 2.9164
- Nilai DU = 1.7527
- Nilai 4 - DU = 2.2473
- Nilai DW (*Durbin Watson*) = 2.166947

Dari hasil perhitungan dapat diketahui $1.7527 < 2.166947 < 2.9164$ ($DU < DW < (4-DL)$), artinya tidak terdapat autokorelasi

Grafik 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Menurut Napitupulu *et al.* (2021) dari hasil uji di atas dapat dilihat bahwa grafik residual yang berwarna biru telah melewati batas yang telah ditentukan (0.05 dan -0.05), hal ini berarti varian residual tidak sama dan dapat diindikasikan terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga perlu dilakukan penyembuhan. Ketika data terjadi heteroskedastisitas maka dapat diperbaiki menggunakan teknik penyembuhan heteroskedastisitas dengan menggunakan *Generalized Least Square* (GLS) dengan *cross-section weights*, metode tersebut sudah mampu mengatasi permasalahan indikasi heteroskedastisitas sehingga model dapat bersifat *Best Linear Unbiased Estimation* (BLUE). Penggunaan teknik penyembuhan ini juga sebelumnya pernah dilakukan oleh Ngatini (2022) dan penelitian Parstiwi & Handayani (2021).

Model Regresi Data Panel

Tabel 9. Hasil Model Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.198571	0.100809	-1.969763	0.0515
X1	0.077761	0.031590	2.461611	0.0155
X2	0.009975	0.028688	0.347693	0.7288
X3	0.339323	0.117289	2.893056	0.0046
X4	1.17E-08	2.74E-08	0.427579	0.6698

Dalam model yang terkena heteroskedastisitas dengan teknik penyembuhan heteroskedastisitas dengan menggunakan *Generalized Least Square* (GLS) dengan *cross-section weights* maka didapatkan hasil uji FEM di atas dan model fungsional dari hasil di atas dapat dituliskan sebagai berikut:

$$BM = -0.198571 + 0.077761 \text{ REP it} + 0.009975 \text{ RPP it} + 0.339323 \text{ RKT it} - 1.17E-08 \text{ JP it} + e$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

REP = Rasio Efektivitas PAD

RPP = Rasio Pertumbuhan PAD

RKT = Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

JP = Jumlah Penduduk

E = error

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan FEM yang telah dilakukan penyembuhan dari heteroskedastisitas di atas dapat diketahui bahwa:

- Apabila variabel independen atau variabel bebas dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai koefisien konstanta (C) sebesar -0.198571 pada 27 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat yang menunjukkan besaran variabel dependen (belanja modal), ketika variabel-variabel lain tidak memberikan pengaruh terhadapnya. Dengan kata lain, nilai tersebut merepresentasikan tingkat belanja modal dasar yang akan tetap ada meskipun variabel lain dalam model tidak berkontribusi secara signifikan atau dengan kata lain akan tetap ada meskipun tidak dipengaruhi oleh variabel lain.
- Nilai koefisien regresi variabel X1 atau variabel rasio efektivitas PAD (REP) sebesar 0.077761 hal ini menandakan terdapat hubungan positif variabel efektivitas PAD (REP) terhadap belanja modal. Artinya, setiap kenaikan 1% di rasio efektivitas PAD (REP) akan meningkatkan nilai alokasi belanja modal sebesar 0.077761% dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel X2 atau variabel rasio pertumbuhan PAD (RPP) sebesar 0.009975 hal ini menandakan terdapat hubungan positif variabel rasio pertumbuhan PAD (RPP) terhadap belanja modal. Artinya, setiap kenaikan 1% di rasio pertumbuhan PAD (RPP) akan meningkatkan nilai alokasi belanja modal sebesar 0.009975% dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel X3 atau variabel rasio ketergantungan keuangan daerah (RKT) sebesar 0.339323 hal ini menandakan terdapat hubungan positif variabel rasio ketergantungan keuangan daerah (RKT) terhadap belanja modal. Artinya, setiap kenaikan 1% di tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah (RKT) akan meningkatkan nilai alokasi belanja modal sebesar 0.339323% dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel X4 atau variabel jumlah penduduk (JP) sebesar 1.17E-08 hal ini menandakan terdapat hubungan positif variabel variabel jumlah penduduk (JP)

terhadap belanja modal. Artinya, setiap kenaikan 1 jiwa di jumlah penduduk (JP) akan meningkatkan nilai alokasi belanja modal sebesar 0.00000117% dengan asumsi variabel lain konstan. **Model Hipotesis**

Uji Adjusted R-Squared

Tabel 10. Hasil Uji Adjusted R-Squared

R-squared	0.718040	Mean dependent var	0.192631
Adjusted R-squared	0.636706	S.D. dependent var	0.106534
S.E. of regression	0.039304	Sum squared resid	0.160663
F-statistic	8.828239	Durbin-Watson stat	1.694974
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dalam hasil pengujian di atas diperoleh nilai R^2 sebesar 0.718040 dan nilai *Adjusted R-Squared* dengan nilai 0.636706, artinya pada variabel independen efektivitas PAD, pertumbuhan PAD, ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk mampu menjelaskan belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023 sebesar 63.67%. Untuk sisanya yaitu 36.33% dapat dijelaskan dipengaruhi oleh variabel lain (di luar empat variabel tersebut). Nilai *adjusted R²* 63.67% ini menunjukkan bahwa variabel independen dapat memberikan kontribusi yang cukup berpengaruh terhadap perubahan variabel dependen.

Uji T

Tabel 11. Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.198571	0.100809	-1.969763	0.0515
X1	0.077761	0.031590	2.461611	0.0155
X2	0.009975	0.028688	0.347693	0.7288
X3	0.339323	0.117289	2.893056	0.0046
X4	1.17E-08	2.74E-08	0.427579	0.6698

Pada uji T atau uji parsial dapat dilakukan dengan melihat hasil pengujian yang telah dilakukan di atas maka dapat dijelaskan hasil pengujiannya sebagai berikut:

- Pada hasil regresi tersebut, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau *p-value* variabel rasio efektivitas PAD (REP) sebesar 0.0155 dimana nilai ini lebih kecil daripada α (0.05) atau *p-value* < α , artinya H_0 ditolak atau variabel rasio efektivitas PAD (REP) berpengaruh terhadap belanja modal.
- Pada hasil uji regresi tersebut, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau *p-value* variabel rasio pertumbuhan PAD (RPP) sebesar 0.7288 dimana nilai ini lebih besar daripada α (0.05) atau *p-value* > α , artinya H_0 diterima atau variabel rasio pertumbuhan PAD (RPP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
- Pada hasil uji regresi tersebut, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau *p-value* variabel rasio ketergantungan keuangan daerah (RKT) sebesar 0.0046 dimana nilai ini lebih kecil daripada α (0.05) atau *p-value* < α , artinya H_0 ditolak atau variabel rasio ketergantungan keuangan daerah (RKT) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.
- Pada hasil uji regresi tersebut, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau *p-value* variabel jumlah penduduk (JP) sebesar 0.6698 dimana nilai ini lebih besar daripada α (0.05) atau *p-value* > α , artinya H_0 diterima atau variabel jumlah penduduk (JP) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Uji F

Tabel 11. Hasil Uji F

R-squared	0.718040	Mean dependent var	0.192631
Adjusted R-squared	0.636706	S.D. dependent var	0.106534

S.E. of regression	0.039304	Sum squared resid	0.160663
F-statistic	8.828239	Durbin-Watson stat	1.694974
Prob(F-statistic)	0.000000		

Pada uji F atau uji simultan dapat dilakukan dengan melihat hasil pengujian yang telah dilakukan di atas maka dapat dijelaskan hasil pengujiannya yaitu dapat diketahui bahwa nilai *F-statistic* sebesar 8.828239 dan nilai probabilitas atau *p-value F-statistic* sebesar 0.000000 yang mana ini menjelaskan bahwa $\text{Prob}(F\text{-statistic}) < \alpha$, maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel efektivitas PAD, pertumbuhan PAD, ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan hasil *p-value* < 0.05 , berarti hipotesis awal yaitu rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, rasio ketergantungan keuangan, dan jumlah penduduk secara bersamaan berpengaruh terhadap belanja modal yang telah peneliti susun dapat diterima.

4.2 Pembahasan

a. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2019-2023

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target yang telah ditetapkan. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa *p-value* rasio efektivitas PAD sebesar 0.0155 dengan koefisien 0.077761, sehingga variabel ini berpengaruh positif terhadap belanja modal dan hipotesis H1 dinyatakan diterima. Artinya, semakin tinggi efektivitas pengelolaan PAD, maka semakin besar pula alokasi belanja modal, dan sebaliknya. Temuan ini menegaskan pentingnya efektivitas PAD dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, karena pemerintah daerah yang mampu mencapai target pendapatan akan memiliki kapasitas anggaran lebih baik untuk pembangunan publik. Hasil ini sejalan dengan teori agensi yang menekankan bahwa pemerintah sebagai agent berkewajiban mengelola sumber daya publik secara efisien dan akuntabel demi kepentingan masyarakat sebagai principal. Efektivitas PAD yang tinggi mencerminkan kinerja keuangan yang baik, yang berdampak pada meningkatnya proporsi belanja modal untuk pelayanan publik dan pembangunan ekonomi. Temuan penelitian ini konsisten dengan studi Putri & Rahayu (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, namun tidak sejalan dengan hasil Andani (2022) yang menemukan bahwa efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

b. Pengaruh Rasio Pertumbuhan PAD Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai probabilitas atau *p-value* rasio pertumbuhan PAD sebesar 0.7288 dengan koefisien 0.009975 menunjukkan bahwa rasio pertumbuhan PAD tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga hipotesis H2 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa naik-turunnya pertumbuhan PAD tidak secara langsung memengaruhi alokasi belanja modal, karena pemerintah daerah belum menjadikan indikator pertumbuhan PAD sebagai dasar utama dalam perencanaan anggaran pembangunan. Pertumbuhan PAD yang bersifat fluktuatif dan bergantung pada kondisi ekonomi serta kemampuan pemungutan pajak daerah membuat indikator ini kurang stabil untuk digunakan sebagai acuan belanja jangka panjang. Dari perspektif *agency theory*, fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* belum optimal memanfaatkan peningkatan PAD untuk kepentingan investasi publik jangka panjang, karena sebagian besar masih dialokasikan pada belanja operasional dan kebutuhan rutin, sehingga memunculkan potensi *agency problem*. Ketidakstabilan

pertumbuhan PAD di Jawa Barat seperti fluktuasi signifikan Kabupaten Pangandaran yang mendapatkan rasio pertumbuhan tertinggi pada 2021 dan 2022 yang mencapai 66.35% dan 46.60%, namun turun menjadi -5.45% pada 2023 menjadi salah satu contoh penyebab kehati-hatian daerah dalam menambah belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Zelmianti (2016) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, namun berbeda dengan penelitian Andani (2022) yang menemukan pengaruh signifikan.

c. Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai *p-value* variabel rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar 0.0046 dengan koefisien 0.339323 menunjukkan bahwa ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga hipotesis H3 diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun provinsi, semakin besar alokasi yang dapat dialokasikan untuk belanja modal. Kondisi rasio ketergantungan keuangan daerah ini seharusnya berpengaruh dengan arah negatif tapi kondisi yang ditemukan pada penelitian ini dapat terjadi karena belum seluruh pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri akibat keterbatasan potensi fiskal dan perbedaan kemampuan keuangan antar wilayah. Contohnya, Kabupaten Tasikmalaya dengan tingkat ketergantungan paling tinggi di Jawa Barat menunjukkan keterbatasan PAD sehingga anggaran pembangunan sangat bergantung pada dana transfer (bp2d Jabar, 2023). Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Peacock dan Wiseman dalam Sutjipto *et al.* (2017) yang menjelaskan bahwa transfer pusat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi otonomi daerah, termasuk pembiayaan belanja modal. Namun, hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori agensi yang memprediksi arah hubungan negatif, karena semakin tingginya ketergantungan keuangan daerah dapat mengurangi insentif untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Sutjipto *et al.* (2017), namun bertentangan dengan Annisa Sarina Devi *et al.* (2022) yang menemukan bahwa ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

d. Pengaruh Jumlah Penduduk Berpengaruh Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil uji parsial, nilai *p-value* variabel jumlah penduduk sebesar 0.6698 dengan koefisien 0.00000117 menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga hipotesis H4 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak serta-merta mendorong peningkatan alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, karena kebijakan belanja modal daerah lebih dipengaruhi oleh kapasitas fiskal dibanding faktor demografis. Meskipun menurut Todaro & Smith (2020) peningkatan jumlah penduduk seharusnya diikuti dengan peningkatan kebutuhan publik, kenyataannya banyak daerah berpenduduk besar justru memiliki keterbatasan PAD dan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi. Dari perspektif teori agensi, hasil ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal menyesuaikan belanja modal dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, sehingga masih terjadi kesenjangan antara pertumbuhan penduduk dan kebijakan pembangunan. Temuan penelitian ini konsisten dengan Marseno & Mulyani (2020), namun bertentangan dengan Susiani &

Rusianti (2022) yang menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

e. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, Rasio Pertumbuhan PAD, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Jumlah Penduduk Secara Simultan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil uji simultan, nilai probabilitas F-statistic sebesar 0.000000 menunjukkan bahwa rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga hipotesis H5 diterima. Hasil ini menegaskan bahwa kinerja fiskal daerah dan kondisi demografis memiliki peran penting dalam menentukan besaran alokasi belanja modal yang digunakan untuk pembentukan aset tetap seperti infrastruktur dan fasilitas publik. Secara teoritis, temuan ini mendukung pandangan teori agensi yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai agent bertanggung jawab mengelola sumber daya publik secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai principal. Ketika efektivitas dan pertumbuhan PAD meningkat, ketergantungan fiskal berkurang, dan kebutuhan publik bertambah seiring jumlah penduduk, maka kemampuan pemerintah untuk meningkatkan investasi melalui belanja modal juga semakin besar. Secara praktis, temuan ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan belanja modal tidak dapat dilepaskan dari kondisi keuangan daerah secara keseluruhan, sehingga diperlukan penguatan pendapatan asli daerah yang berkelanjutan serta pengelolaan fiskal yang responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk terhadap rasio belanja modal, maka dapat dinyatakan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu:

- Variabel rasio efektivitas PAD (X1) berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal (Y) dengan $p\text{-value } 0.0155 < 0,05$.
- Variabel rasio pertumbuhan PAD (X2) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal (Y) dengan $p\text{-value } 0.7288 > 0.05$.
- Variabel rasio ketergantungan keuangan daerah (X3) berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal (Y) dengan $p\text{-value } 0.0046 < 0.05$.
- Variabel jumlah penduduk (X4) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal (Y) dengan $p\text{-value } 0.6698 > 0.05$.
- Rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan jumlah penduduk secara simultan terhadap belanja modal dengan nilai probabilitas atau $p\text{-value } F\text{-statistic}$ sebesar 0.000000 yang mana ini menjelaskan bahwa $\text{Prob } (F\text{-statistic}) < \alpha$.

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, M. F. (2022). PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 4(2).
- Annisa Sarina Devi, Masnila, N., & Nurhasanah. (2022). PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. 4.

- Azzahra, A., & Sudrajat. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 174-182. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3397>
- BAPEDA Jawa Barat. (2024). *RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025-2029*.
- Basuki, A. T. (2021). *ANALISIS DATA PANEL DALAM PENELITIAN EKONOMI DAN BISNIS*.
- bp2d Jabar. (2023). *2023 Policy Brief Upaya Meningkatkan Kapasitas Daerah CDPOB Tasikmalaya Selatan*.
- BPS. (2023). *STATISTICAL YEARBOOK OF INDONESIA 2023*.
- Caraka, R. E. (2017). *SPATIAL DATA PANEL*.
- Diskominfosanditik Kab. Sumedang. (2022). *Sumedang Raih Kabupaten Terbaik Ke-2 Tingkat Nasional*. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/sumedang-raih-kabupaten-terbaik-ke-2-tingkat-nasional>
- DJPb. (2024). *IMPLEMENTASI DESENTRALISASI FISKAL BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 2022*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3126-implementasi-desentralisasi-fiskal-berdasarkan-uu-no-1-tahun-2022.html#:~:text=Dari data empiris diketahui sebagian,pelayanan publik baru sekitar 20%25>.
- DKPP Kota Bandung, D. K. (2021). *Buruan SAE Hantarkan Kota Bandung Jadi Salah Satu Kota Terbaik Tingkat Nasional*. <https://dkpp-kota.bandung.go.id/detail-berita/buruan-sae-hantarkan-kota-bandung-jadi-salah-satu-kota-terbaik-tingkat-nasional>
- Irnowati, D, S., & Abidin, Z. (2023). *Analisis kinerja keuangan daerah pada pemerintah kota makassar*. 4, 403-416.
- Junaidi. (2010). *Tabel Durbin- Watson (DW), $\alpha = 5\%$ (pp. 1-13)*.
- KDP Kota Sukabumi, K. K. (2023). *Wali Kota Sukabumi Terima Penghargaan Pembangunan Daerah Terbaik Pertama Nasional*. <https://kdp.sukabumikota.go.id/2023/06/wali-kota-sukabumi-terima-penghargaan.html>
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452-3467. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.295>
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data dengan SPSS - STATA - EViews*.
- Ngatini. (2022). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Defis*, 11.
- Oktavianti, Y. A. (2020). *PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR*.
- Parstiwi, S. A. T., & Handayani, H. R. (2021). *PROVINSI JAWA TENGAH (STUDI KASUS 35 KAB / KOTA PROVINSI JAWA TENGAH). DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS*, 10, 135-147.
- Pasaribu, D., Situmorang, C. V., Darmayanti, N., Triyani, Y., Heningtyas, O. S., Astuti, E. B., Syamil, A., Wardhana, A., Indriani, I. K., Syarif, S. M., Amru, M., Sulaksono, H., Rachmanu, E. D., Setiawan, G., Halawa, F., Sundari, A., & Silvera, D. L. (2023). *Metodologi Penelitian Akuntansi Dan Manajemen Pendekatan Kuantitatif*. In *Penerbit Media Sains Indonesia* (Issue 2).
- Permatasari, D. N., Satriani, R., & Mandamdari, A. N. (2024). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pendapatan Usahatani Padi (Studi Kasus Gapoktan Lestari Desa Bulakpacing Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal). *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 10(2), 1852-1865.
- Permendagri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Permendagri No 77 Tahun 2020*, 1-445.

- Prihadyatama, A. (2024). No Title. *PANDUAN PRAKTIS EViews*.
- Putri, R. S., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Barat. *JASa: Jurnal Akuntansi Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi* , 3(2), 256-268. <https://doi.org/10.36555/jasa.v3i2.429>
- Rohyana, C., & Dentisa Ramadhanti, D. (2024). Pengaruh Rasio Efisiensi dan Rasio Efektifitas PAD Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Land Journal*, 5(2), 330-341. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i2.3631>
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D*. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Susiani, & Rusianti, A. (2022). Pengaru Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 327-341.
- Sutjipto, H., Suci, S. C., & Umbara, Y. S. (2017). *Analisis desentralisasi fiskal terhadap belanja modal pemerintah daerah di indonesia*. 3, 104-117.
- Taufik Hidayat, Permatasari, M. D., & Aeni, P. (2024). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Kinerja Keuangan Terhadap Belanja Modal Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(01), 105-115. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1818>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development. Economic Development (Elevent)*.
- Wibowo, S. A. (2025). *Penggunaan EViews dalam Pengujian Data Panel untuk Penelitian Akuntansi : Pendekatan Konseptual dan Aplikatif*. 9(1). <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26898>
- Zelmiyanti, R. (2016). PENDEKATAN TEORI KEAGENAN PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN BELANJA MODAL (STUDI PADA PROVINSI DI INDONESIA). *Jrak*, 7(1), 11-21.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala-Repository IMWI*, 3(1), 61-74.